

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional saat ini diharapkan dapat meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Pembangunan nasional terutama dalam pembangunan di bidang ekonomi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta dapat mewujudkan tujuan nasional. Hal ini diwujudkan salah satunya dengan menetapkan kebijakan ekonomi yang memadai.

Dalam bidang perbankan, baik pemerintah maupun masyarakat sebagai perorangan atau badan hukum sangatlah memerlukan dana dalam jumlah yang besar untuk menjalankan usaha yang dibangunnya. Sehingga banyak lembaga keuangan seperti perbankan telah membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjaman uang antara lain dalam bentuk kredit perbankan.

Bank merupakan salah satu sumber permodalan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sehingga bank dituntut peran sertanya untuk mensukseskan pembangunan melalui jasa kredit yang sangat dibutuhkan masyarakat. Pemberian kredit sangat berguna bagi masyarakat karena dapat mendorong pertumbuhan perekonomian suatu bangsa. Namun, pengelolaan perkreditan mempunyai berbagai masalah yang cukup rumit seperti timbulnya kredit macet, yang disebabkan karena tidak mempunya nasabah dalam memenuhi

kewajibannya. Kredit macet dalam jumlah yang sangat besar akan berpengaruh terhadap bank tersebut.

Untuk mendapatkan hasil yang baik diperlukan pengelolaan perkreditan yang baik dengan penerapan pengendalian internal yang efektif dan efisien. Pengendalian internal yang memadai pada dasarnya bertujuan untuk melindungi harta milik organisasi dengan meminimalkan kemungkinan terjadinya penyelewengan, pemborosan, kredit macet, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Dengan pengendalian internal yang memadai diharapkan dapat menjamin proses pemberian kredit tersebut akan dapat terhindar dari kesalahan-kesalahan dan penyelewengan-penyelewengan.

Pengendalian atas pemberian kredit sangatlah penting bagi sebuah bank karena pemberian kredit merupakan salah satu sumber utama pendapatan bank yang berupa bunga kredit dan juga sekaligus sumber resiko operasi bisnis terbesar. Resiko yang mungkin terjadi bagi bank tersebut adalah resiko kemacetan yang disebabkan kelemahan bank dalam hal kebijakan pemberian kredit, pengawasan serta penagihan. Hal ini bisa saja terjadi karena si penerima kredit memang “nakal” atau dikarenakan peristiwa atau musibah yang dialami penerima kredit tersebut sehingga ia tidak bias memenuhi kewajibannya. Karena adanya resiko dalam pemberian kredit, maka bank harus hati-hati dalam memberikan kredit. Sehingga para pejabat kredit suatu bank harus mempunyai kemampuan untuk mengetahui kreabilitas dan integritas calon nasabah serta jumlah kredit yang diberikan.

Oleh karena itu, pengendalian pembiayaan harus diterapkan pada sebuah aktifitas pembiayaan, baik sebelum maupun sesudah pembiayaan tersebut dicairkan. Pengawasan ini dapat berupa pengawasan atau pemantauan terhadap pemberian pembiayaan, kataatan manajemen terhadap usaha dan penggunaan dari pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tersebut.

Pemantauan adalah porses menentukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Petunjuk tentang masalah atau bidang yang memerlukan perbaikan yang bersumber dari fungsi audit intern, ukuran usaha dan struktur pengendalian.

Salah satu jenis perbankan yang memberikan kredit adalah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu. PD. BPR Rokan Hulu pada hakekatnya adalah suatu lembaga keuangan milik Pemerinth Daerah yang melakukan usaha perbankan yang semula didirikan berdasarkan ketentuan pokok pemerintah daerah. PD. BPR Rokan Hulu dimaksudkan sebagai sarana untuk pengembangan ekonomi dan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Keberadaanya secara resmi dimulai tahun 2007 lalu sesuai Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor:9/33/KEP.GBI/DPG/2007 memutuskan pemberian Izin Usaha BPR Rokan Hulu.

Latar belakang pendirian PD. BPR Rokan Hulu disebabkan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Rokan Hulu dan juga sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan peraturan perundangan yang berlaku, diperlukan sebuah lembaga keuangan yang menjadi milik masyarakat dan pemerintah daerah,

maka Pemerintah Daerah Rokan Hulu berniat mendirikan Lembaga Keuangan atau Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu merupakan lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Kegiatan usaha PD. BPR Rokan Hulu terutama untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di pedesaan dan pokok usaha PD. BPR Rokan Hulu adalah kredit. Bentuk hukum PD. BPR Rokan Hulu dapat berupa perseroan terbatas Dalam melaksanakan usahanya, PD. BPR Rokan Hulu berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Kredit yang ditawarkan oleh PD. BPR Rokan Hulu kepada nasabahnya pastilah akan memiliki risiko. Risiko yang terjadi pada umumnya seperti kredit macet. Kredit macet terjadi disebabkan oleh faktor manajemen bank dalam melakukan analisis kredit yang tidak akurat, faktor penguasaan kredit yang lemah, analisis laporan keuangan yang tidak cermat dan kompetensi dari sumber daya manusia yang masih lemah. Kredit akan diberikan apabila manajemen PD. BPR Rokan Hulu merasa yakin bahwa nasabahnya dapat mengembalikan kredit tersebut sesuai dengan waktu yang telah disepakati, baik pokok ataupun bunga pinjaman yang ditetapkan, melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal agunan, dan prospek usaha dari debitur. Apabila unsur-unsur yang ada telah dapat meyakinkan kreditur atas kemampuan debitur maka jaminan cukup hanya berupa jaminan pokok saja dan bank tidak wajib meminta jaminan

tambahan sehingga bank dapat menghindari tidak tertagihnya kredit tersebut, yang nantinya akan menimbulkan masalah kredit macet.

Jika dilihat realita di lapangan, kredit macet banyak ditemukan. Hal ini terjadi karena ketidak mampuan nasabah dalam melunasi pinjamannya sehingga kegiatan pada PD. BPR Rokan Hulu tersebut bisa terhambat sebab keuntungan utama PD. BPR Rokan Hulu diperoleh dari bunga simpanan kepada nasabah dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. Untuk itu, PD. BPR Rokan Hulu haruslah memiliki kemampuan menilai mutu kredit yang akan mereka berikan kepada nasabah dan PD. BPR Rokan Hulu perlu menerapkan pengendalian internal yang memadai. Dengan adanya pengendalian internal tersebut, diharapkan PD. BPR Rokan Hulu akan dapat meminimalkan kemacetan kredit dan pelaksanaannya dapat memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.

PD. BPR Rokan Hulu secara umum pembiayaannya diberikan kepada masyarakat berupa Kredit Modal Kerja Umum (diantaranya pinjaman kredit modal kerja pertanian, pinjaman kredit modal kerja perdagangan dan pinjaman kredit modal kerja jasa-jasa). Pinjaman Kredit Konsumtif dan pinjaman Kredit Bakulan. Jumlah dan kondisi pembiayaan yang terdapat di PD. BPR Rokan Hulu disajikan pada tabel 1.1 berikut ini:

Dari tabel 1.1 dapat diketahui bahwa pada tahun 2015, total kredit yang diberikan kepada masyarakat adalah Rp. 39.364.127.019,-. Dari jumlah ini terdapat kredit macet sebesar Rp. 288.742.504,-. Hal ini tentu harus menjadi perhatian khusus pihak bank, karena jika dibiarkan jumlah kredit macet ini bisa jadi akan semakin meningkat dilihat dari jumlah kredit yang kurang lancar sebesar Rp. 1.078.803.816,- dan kredit yang diragukan sebesar Rp. 151.901.464,-. Artinya jika dilihat secara persentase dari jumlah tersebut pembiayaan yang lancar pengembaliannya hanya sebesar 98,14% dan sisanya sebesar 1,86% adalah pembiayaan bermasalah. Terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut kemungkinan berkaitan dengan pengendalian intern pemberian kredit yang diterapkan oleh PD. BPR Rokan Hulu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai sistem pengendalian internal pada bank dengan judul "*Tinjauan Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit pada PD. BPR Rokan Hulu*".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis dapat merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pemberian kredit PD. BPR Rokan Hulu?
2. Apakah sistem pengendalian internal pemberian kredit yang diterapkan PD.

BPR Rokan Hulu sudah efektif?

1.3. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui sistem pemberian kredit PD. BPR Rokan Hulu.
2. Mengetahui efektifitas penerapan sistem pengendalian internal pemberian kredit pada PD. BPR Rokan Hulu.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Sebagai penambahan dan pengembangan ilmu yang penulis peroleh, terutama dalam ilmu manajemen dan pemasaran.

b. Manfaat praktis

Sebagai bahan masukan dalam masalah perkreditan khususnya dalam pengendalian internalnya.

c. Manfaat bagi pembaca atau peneliti selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan acuan bagi penelitian yang sejenis selanjutnya.

1.5. Pembatasan Masalah dan Originalitas

1.5.1. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus, dan tidak meluas, penulis membatasi penelitian ini pada efektifitas penerapan sistem pengendalian internal pemberian kredit yang dilakukan oleh PD. BPR Rokan Hulu.

1.5.2. Originalitas

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu oleh Luth Artining Miradewi dkk, mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja tahun 2014, melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Seririt. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendaliannya baik dan dikategorikan memadai. Pengujian kepatuhan dengan menggunakan *attribute sampling*, metode *stop-or-go sampling* menunjukkan sistem pengendalian intern pemberian kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Seririt dikatakan efektif. Perbedaan peneliti sekarang dengan terdahulu adalah terletak pada teknik analisa yang digunakan dan lokasi perusahaan.

1.6 Sistematika Proposal

Sistematika penulisan Skripsi ini terdiri dari lima bab yakni:

- BAB I : Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan penelitian.
- BAB II : Merupakan landasan teori, kerangka konseptual dan hipotesis. Pada landasan teori di bahas Bab ini berisi tentang landasan teori yang menguraikan teori–teori penelitian ini mengenai efektivitas, kredit, sistem pengendalian internal, serta pengendalian kredit bank.
- BAB III : Merupakan metode penelitian yang menjelaskan tentang waktu dan tempat penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis dan

sumber data, tehnik pengumpulan data, devenisi operasional variabel serta analisis data.

BAB IV : Merupakan hasil dan pembahasan yang menjelaskan secara singkat mengenai pelaksanaan penelitian dan membahas hipotesis yang diuji apakah merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah terbukti atau tidak.

BAB V : merupakan penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari masalah atau hipotesis yang diajukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian intern merupakan proses kebijaksanaan atau prosedur yang dijalankan dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, efektivitas dan efisiensi operasi serta untuk menjaga aktiva perusahaan (Amanina, 2011:23).

Menurut Mulyadi (2009:180), defenisi pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personil lainnya yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang keadaan laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, efektifitas dan efisiensi operasi.

Sejalan dengan Teguh (2010:264), menyebutkan defenisi sistem pengendalian internal meliputi susunan dan semua cara, peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan untuk menjaga dan mengamankan keuangan, memajukan efisiensi kerja dan mendorong dipatuhinya kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh top manajer.

Dalam laporan *Committe of Sponsoring Organizations (COSO)* yang dikutip oleh Boynton dkk dalam bukunya yang berjudul *Modern Auditing* (2010:373) mendefinisikan pengendalian internal sebagai suatu proses yang

dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas, yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan dalam kategori berikut:

- a. Keandalan pelaporan keuangan
- b. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
- c. Efektivitas dan efisiensi operasi

Dari beberapa pendapat tentang sistem pengendalian internal dapat disimpulkan bahwa Pengendalian intern merupakan tindakan-tindakan yang harus diambil dalam perusahaan untuk mengatur dan mengarahkan aktivitas-aktivitas perusahaan. Suatu perusahaan yang berjalan harus memonitor kegiatan dan hasilnya. Bagian manajemen juga harus mempunyai pandangan dan sikap profesional untuk memajukan dan meningkatkan hasil yang akan dicapai.

2.1.1. Komponen Sistem Pengendalian Internal

Untuk mencapai tujuan dari suatu pengendalian internal, terdapat lima komponen pengendalian internal yang dapat dirancang dan diimplementasikan oleh manajemen guna mencapai tujuan-tujuan tersebut. Suatu pengendalian internal terdiri dari lima komponen yang saling berhubungan (Mulyadi, 2011:142), yaitu:

1. Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian mencerminkan sikap dan tindakan para pemilik serta manajer perusahaan mengenai pentingnya pengendalian internal perusahaan. Lingkungan pengendalian menentukan iklim organisasi dan mempengaruhi kesadaran karyawan terhadap pengendalian. Lingkungan pengendalian terdiri dari beberapa faktor berikut:

a. Nilai etika dan kejujuran

Etika dan kejujuran merupakan dasar dari pengendalian yang dilakukan oleh manajemen dalam mengurangi dan meredam tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh individu-individu dalam perusahaan karena pelanggaran etika dapat menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi perusahaan.

b. Keinginan untuk maju

Keinginan untuk mengembangkan lingkungan pengendalian, untuk mendapatkan suatu perbaikan serta pertimbangan manajemen terhadap kecakapan seseorang dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu dan bagaimana tingkat kecakapannya diterjemahkan ke dalam keahlian dan pengetahuan yang dibutuhkan.

c. Dewan direksi dan komite audit

Suatu kesatuan pengendalian dipengaruhi oleh dewan direksi atau komite audit. Komite audit diberikan tanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan yang mencakup pengendalian internal, ketaatan terhadap undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan agar menjadi efektif dan memelihara komunikasi yang berkesinambungan secara baik dengan auditor eksternal maupun auditor internal.

d. Falsafah manajemen dan gaya operasi

Melalui kebijakan dan aktivitasnya, manajemen memberikan tanda yang jelas terhadap falsafah manajemen dan gaya operasi tentang pentingnya pengendalian internal.

e. Struktur organisasi

Struktur organisasi merupakan pola otoritas dan tanggung jawab yang ada dalam organisasi serta garis pelaporan yang jelas.

f. Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab

Penetapan wewenang dan tanggung jawab dimaksudkan agar mempermudah proses operasi, proses pelaporan, dan memperjelas tingkat kepemimpinan dalam perusahaan.

g. Kebijakan dan pelatihan sumber daya manusia

Kebijakan dan pelatihan sumber daya manusia berhubungan dengan proses penerimaan, penempatan, pelatihan, evaluasi, konseling, promosi dan penggantian karena sumber daya manusia merupakan komponen kunci dalam suatu pengendalian.

2. Aktivitas pengendalian

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang dibangun untuk membantu memastikan arahan manajemen dilaksanakan dengan baik serta meredam risiko dalam pencapaian keseluruhan tujuan secara umum. Kegiatan pengendalian dapat dikategorikan ke dalam kebijakan dan prosedur sebagai berikut:

a. Tinjauan ulang atas penampilan kerja

b. Pengelolaan informasi

c. Pengendalian umum

d. Pengendalian aplikasi terbagi menjadi:

1) Pengendalian preventif

Bertindak sebagai petunjuk untuk membantu segala sesuatu terjadi seperti yang seharusnya terjadi, meliputi unsur-unsur diantaranya: otorisasi data sumber, konversi data, penyimpanan data sumber, *turn around document*, formulir bernomor urut cetak, validasi masukan, pemutakhiran arsip dengan komputer, dan pengendalian terhadap pengolahan data.

2) Pengendalian detektif

Memberikan petunjuk dimana letak terjadinya masalah yang terdiri dari; *data transmission, control register, control totals, documentation and testin, using label*, dan *output check*.

3) Pengendalian fisik

Pengendalian ini dilakukan terhadap pengendalian fisik atas asset, untuk menjaga asset dari perbedaan perhitungan antara catatan pengendalian dengan hasil dari perhitungan fisik.

4) Pemisahan tugas

Tujuan utama pemisahan tugas adalah menghindari timbulnya kesalahankesalahan yang disengaja atau tidak disengaja dalam pengotorisasian transaksi, pencatatan transaksi dan sebagainya.

3. Perkiraan risiko

Perkiraan risiko merupakan proses mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang mempengaruhi tujuan organisasi. Organisasi harus dapat mengetahui dan menghadapi risiko yang ada, risiko dapat timbul dalam keadaan berikut:

- a. Perubahan dalam lingkungan organisasi
- b. Karyawan baru
- c. Perubahan sistem informasi
- d. Perubahan operasi perusahaan
- e. Teknologi baru

4. Informasi dan komunikasi

Informasi mengacu pada sistem akuntansi organisasi yang terdiri dari metode dan catatan yang diciptakan untuk mengidentifikasi, merangkai, menganalisis, mengelompokkan, mencatat, dan melaporkan transaksi organisasi dan untuk memelihara akuntabilitas aktiva dan utang yang terkait. Sedangkan komunikasi merupakan proses pemahaman peran individu dan pertanggungjawaban yang berhubungan dengan pengendalian internal terhadap laporan keuangan. Komunikasi biasanya secara lisan dan melalui tindakan yang dilakukan oleh manajemen.

5. Pengawasan

Salah satu tanggung jawab manajemen adalah menetapkan dan memelihara fungsi pengendalian internal, manajemen menindaklanjuti pengawasan berkesinambungan terhadap kegiatan operasi perusahaan, evaluasi terpisah atau kombinasi keduanya, seperti dengan cara mempelajari pengendalian internal yang ada, laporan audit internal dan laporan dari pihak luar perusahaan seperti pemerintah dan Bank Indonesia, umpan balik dari karyawan dan masukan dari nasabah.

2.1.2. Keterbatasan Sistem Pengendalian Internal

Dengan ditetapkannya sistem pengendalian intern, perusahaan pasti mengharapkan kesempurnaan yang mencerminkan keadaan yang ideal dan penyelewengan ataupun penyimpangan yang terjadi dapat dihilangkan. Tetapi dalam kenyataannya tidak sedikit perusahaan yang mengalami kesulitan dalam menerapkan sistem pengendalian intern. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan dari sistem pengendalian intern. Keterbatasan sistem pengendalian intern yang dikemukakan oleh Azhar (2010:110) antara lain:

1. Kesalahan (*Error*)
2. Kolusi (*Collusion*)
3. Penyimpangan manajemen
4. Manfaat dan biaya

Menurut Boynton dkk (2010:375) mengidentifikasi keterbatasan yang melekat. Berikut yang menjelaskan mengapa pengendalian internal sebaik apapun ia dirancang dan dioperasikan, hanya dapat menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan pengendalian suatu entitas. Keterbatasan pengendalian internal yaitu:

1. Kesalahan dalam pertimbangan

Kadang-kadang, manajemen dan personil lainnya dapat melakukan pertimbangan yang buruk dalam membuat keputusan bisnis atau dalam melaksanakan tugas rutin karena informasi yang tidak mencukupi, keterbatasan waktu, atau prosedur lainnya.

2. Kemacetan

Kemacetan dalam melaksanakan pengendalian dapat terjadi ketika personil personil salah memahami instruksi atau membuat kekeliruan akibat kecerobohan, kebingungan, atau kelelahan. Perubahan sementara atau permanen dalam personil atau dalam sistem atau prosedur juga dapat berkontribusi pada terjadinya kemacetan.

3. Kolusi

Individu yang bertindak bersama, seperti karyawan yang melaksanakan suatu pengendalian penting bertindak bersama dengan karyawan lain, konsumen atau pemasok, dapat melakukan sekaligus menutupi kecurangan sehingga tidak dapat dideteksi oleh pengendalian internal (misalnya, kolusi antara tiga karyawan mulai dari departemen personil, manufaktur, dan penggajian untuk membuat pembayaran kepada karyawan fiktif, atau skedul pembayaran kembali antara seorang karyawan dalam departemen pembelian dan pemasok atau antara seorang karyawan di departemen penjualan dengan pelanggan).

4. Penolakan manajemen

Manajemen dapat mengesampingkan kebijakan atau prosedur tertulis untuk tujuan tidak sah seperti keuntungan pribadi atau presentasi mengenai kondisi keuangan suatu entitas yang dinaikkan atau status ketaatan (misalnya, menaikkan laba yang dilaporkan untuk menaikkan pembayaran bonus atau nilai pasar dari saham entitas, atau menyembunyikan pelanggaran dari perjanjian hutang atau ketidaktaatan terhadap hukum dan peraturan). Praktik penolakan termasuk membuat penyajian yang salah dengan sengaja kepada

auditor dan lainnya seperti menerbitkan dokumen palsu untuk mendukung pencatatan transaksi penjualan fiktif.

5. Biaya versus manfaat

Biaya pengendalian internal suatu entitas seharusnya tidak melebihi manfaat yang diharapkan untuk diperoleh. Karena pengukuran yang tepat baik dari biaya dan manfaat biasanya tidak memungkinkan, manajemen harus membuat baik estimasi kuantitatif maupun kualitatif dalam mengevaluasi hubungan antara biaya dan manfaat.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern yang diterapkan dalam perusahaan tidak selalu berjalan dengan sempurna, karena sistem pengendalian intern memiliki keterbatasan yang biasanya disebabkan oleh faktor manusia dan biaya yang digunakan tidak boleh melebihi dari manfaatnya.

2.1.3. Pengendalian Kredit Bank

Pengendalian kredit mutlak dilaksanakan untuk menghindari terjadinya kredit macet dan penyelesaian kredit macet. Menurut Hasibuan (2010:105) pengendalian kredit adalah usaha-usaha untuk menjaga kredit yang diberikan tetap lancar, produktif, dan tidak macet.

Menurut Hasibuan (2010:105), tujuan pengendalian kredit antara lain untuk:

1. Menjaga agar kredit yang disalurkan tetap aman.
2. Mengetahui apakah kredit yang disalurkan itu lancar atau tidak.
3. Melakukan tindakan pencegahan dan penyelesaian kredit macet atau kredit bermasalah.

4. Mengevaluasi apakah prosedur penyaluran kredit yang dilakukan telah baik atau masih perlu disempurnakan.
5. Memperbaiki kesalahan-kesalahan karyawan analisis kredit dan mengusahakan agar kesalahan itu tidak terulang kembali.
6. Mengetahui posisi persentase *collectability credit* yang disalurkan bank.
7. Meningkatkan moral dan tanggung jawab analisis kredit bank.

Menurut Hasibuan (2010:105), ada beberapa sistem dalam melaksanakan pengendalian kredit, antara lain:

1. *Internal control of credit* adalah sistem pengendalian kredit yang dilakukan oleh karyawan bank bersangkutan.
2. *Audit control of credit* adalah sistem pengendalian atau penilaian masalah yang berkaitan dengan pembukuan kredit.
3. *External control of credit* adalah sistem pengendalian kredit yang dilakukan pihak luar, baik oleh Bank Indonesia maupun akuntan publik.

Adapun jenis-jenis pengendalian kredit menurut Hasibuan (2010:105) adalah:

1. *Preventif control of credit*, yaitu pengendalian kredit yang dilakukan dengan tindakan pencegahan sebelum kredit tersebut macet.
2. *Repressive control of credit*, yaitu pengendalian kredit yang dilakukan melalui tindakan penagihan/penyelesaian setelah kredit tersebut macet

2.2. Efektifitas

Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Menurut Sedarmayanti

(2009:59), mengemukakan bahwa "Efektifitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai".

Supriyono (2009:29), menyatakan bahwa efektifitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.

Yamit (2010:14), mengemukakan bahwa efektifitas seringkali berarti kuantitas atau kualitas (keluaran) barang dan jasa. Menurut Ravianto dalam Masruri (2014:24), pengertian efektifitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan defenisi efektifitas diatas maka dapat disimpulkan efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna dari suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauh manatujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnya. Hal ini berarti bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki.

Ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukkan pada tingkat sejauh mana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal.

Menurut David Krench, Richard dikutip dalam Danin (2009:119-120), sebagai berikut:

1. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program kegiatan. Hasil tersebut dapat dilihat dari perbandingan antara masukan dengan keluaran.
2. Tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya ukuran dalam efektifitas ini dapat kuantitatif dan dapat kualitatif.
3. Produk kreatif, artinya penciptaan hubungan kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreatifitas dan kemampuan.
4. Intensitas yang akan dicapai, artinya memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens sesuatu, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi.

Sementara itu, Sharma dalam Tangkilisa (2009:64), memberikan ukuran efektifitas organisasi yang menyangkut faktor internal organisasi dan faktor eksternal organisasi antara lain:

1. Produktivitas organisasi (output)
2. Efektifitas organisasi dalam bentuk keberhasilannya menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan di dalam dan luar organisasi.
3. Tidak adanya ketegangan di dalam organisasi atau hambatan-hambatan konflik diantara bagian-bagian organisasi.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa ukuran daripada efektifitas harus adanya suatu perbandingan antara masukan dan keluaran, ukuran daripada efektifitas mesti adanya tingkat kepuasan dan adanya penciptaan hubungan kerja yang

kondusif serta intensitas yang tinggi, artinya ukuran daripada efektifitas adanya keadaan rasa saling memiliki dengan tingkatan yang tinggi.

2.3. Kredit

Secara umum pengertian kredit adalah pemberian penggunaan suatu uang atau barang kepada orang lain diwaktu tertentu dengan jaminan atau tanpa jaminan, dengan pemberian jasa atau bunga atau tanpa bunga.

Istilah kredit berasal dari bahasa Latin yaitu *credere*, yang berarti kepercayaan atau *credo* yaitu saya percaya. Pemberi kredit (kreditur) percaya kepada penerima kredit (debitur) bahwa kredit yang diberikan akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Bagi debitur, kredit yang diterima merupakan kepercayaan yang berarti menerima amanah sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu.

Menurut UU. No. 10 tahun 1998 (pasal 21 ayat 11), pengertian kredit adalah suatu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi uatangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Malayu (2009:87), menyatakan bahwa kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Menurut Teguh (2010:12), mengatakan bahwa” kredit adalah suatu penyerahan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain

yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan bunga jumlah imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.

Dari beberapa pengertian kredit menurut para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa kredit adalah tiap-tiap perjanjian dalam bentuk jasa dan balas jasa atas dasar kepercayaan berdasarkan ketentuan atau perjanjian tertentu yang telah disepakati oleh pihak bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk membayar utangnya pada jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

2.3.1. Unsur-unsur Kredit

Menurut Malayu (2009:3), unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

1. Adanya badan atau orang yang memiliki uang, barang atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain.
2. Adanya pihak yang membutuhkan/meminjam uang, barang atau jasa.
3. Adanya kepercayaan dari kreditur terhadap debitur.
4. Adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur.
5. Adanya perbedaan waktu yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang, barang atau jasa oleh kreditur dengan pada saat pembayaran kembali dari debitur.
6. Adanya resiko yaitu sebagai akibat dari adanya perbedaan waktu seperti diatas, dimana masa yang akan datang merupakan suatu yang belum pasti, maka kredit itu pada dasarnya mengandung resiko, termasuk penurunan nilai uang karena inflansi dan sebagainya.
7. Adanya bunga yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur (walaupun ada kredit yang tidak berguna).

Menurut Kasmir (2009:94), unsur-unsur kredit sebagai berikut:

1. Kepercayaan yaitu suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu yang akan datang.
2. Kesepakatan yaitu suatu unsure antara sipemberi dan sipenerima kredit.
3. Jangka waktu yaitu tenggang waktu masa pengembalian kredit yang telah disepakati, bias berbentuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
4. Resiko yaitu suatu alasan yang menyebabkan tidak tertagihnya atau macetnya pemberian kredit.
5. Balas jasa yaitu keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa kredit tersebut yang biasa disebut dengan bunga.

2.3.2. Tujuan dan Fungs Kredit

Menurut Thomas (2010:15), pemberian kredit dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, oleh karena itu bank memberikan pinjaman kepada nasabahnya dalam bentuk kredit, jika merasa yakin nasabah yang akan menerima kredit itu mampu dalam memberikan kredit yang telah diterimanya.

Menurut Kasmir (2009:105) tujuan pemberian kredit yaitu:

1. Mencari keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

2. Membantu usaha nasabah

Untuk membantu nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja.

3. Membantu pemerintah

Membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil.

Menurut Rachmad (2009:13), fungsi pokok kredit pada dasarnya ialah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumen yang semuanya itu ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup manusia.

Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan menurut Muchdarsyah (2010:211) yaitu:

1. Kredit dapat meningkatkan daya guna dari uang
2. Kredit dapat meningkatkan daya guna dari barang
3. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
4. Kredit adalah salah satu alat stabilitas ekonomi
5. Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat

Berbeda dengan Malayu (2009:5), menyebutkan beberapa fungsi kredit yaitu:

- a. Kredit dapat memajukan arus tukar menukar barang-barang dan jasa-jasa.
- b. Kredit dapat mengaktifkan alat pembayaran yang idle.
- c. Kredit dapat menciptakan alat pembayaran baru.
- d. Kredit sebagai alat pengendalian harga.
- e. Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat /faedah kegunaan potensi-potensi ekonomi yang ada.

2.3.3. Jenis-jenis Kredit

Menurut Rachmad (2009:10), jenis-jenis kredit didasarkan atas:

1. Kredit ditinjau penggunaannya

- 1) Kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang atau jasa yang dapat memberikan kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia. Misalnya kredit untuk membeli rumah, pakaian dan sebagainya.
- 2) Kredit produktif, yaitu kredit yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif dalam arti dapat meningkatkan daya guna. Kredit produktif ini terbagi menjadi tiga yaitu:
 - a. Kredit investasi, yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang untuk modal tetap dan tahan lama.
 - b. Kredit modal kerja, yaitu kredit yang ditujukan untuk keperluan modal kerja yang habis dalam satu atau beberapa kali produksi.
 - c. Kredit likuiditas, yaitu kredit yang tidak mempunyai tujuan konsumtif secara langsung tidak pula bertujuan produktif melainkan mempunyai tujuan untuk membantu perusahaan yang sedang berada dalam kesulitan likuiditas dalam rangka pemeliharaan kebutuhan minimalnya.

2. Kredit ditinjau dari segi materi yang dialihkannya

- 1) Kredit dalam bentuk uang (*Money credit*)
- 2) Kredit dalam bentuk bukan uang (*Non money credit*)

3. Kredit ditinjau dari cara penggunaannya

- 1) Kredit tunai (*Cash credit*), yaitu kredit yang penguangannya dilakukan tunai atau pembukuan ke dalam rekening debitur atau rekening yang ditunjukkan debitur.

- 2) Kredit bukan/tidak tunai (*Non cash credit*), yaitu kredit yang tidak dibayarkan langsung pada saat perjanjian ditandatangani melainkan diperlukan adanya tenggang waktu sesuai yang dipersyaratkan.
4. Kredit menurut jangka waktunya
- 1) Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang berjangka waktu maksimal satu tahun. Biasanya kredit jangka pendek ini cocok untuk membiayai kebutuhan modal kerja.
 - 2) Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang berjangka waktu antara satu sampai tiga tahun. Kredit jangka menengah ini biasanya kredit berupa modal kerja, atau kredit investasi yang relatif tidak terlalu besar jumlahnya.
 - 3) Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun.

2.3.4. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Menurut Rachmad Firdaus (2010:139), prinsip yang harus dilaksanakan oleh suatu bank dalam rangka mempertimbangkan dalam pemberian kredit yaitu dengan analisis 5C dan 7P. Penilaian dengan analisis 5C adalah sebagai berikut:

1. *Character*

Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakangsi nasabah, baik yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan dan jiwa sosial.

2. *Capacity*

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. *Capacity* sering juga disebut dengan nama *Capability*.

3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitasnya, rentabilitas dan ukuran lainnya. Analisis *capital* juga harus menganalisis sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.

4. *Condition of Economic*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

5. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

Penilaian kredit dengan menggunakan 7P menurut Rachmad (2010:141) adalah sebagai berikut:

1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya masa lalu. Penilaian personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.

2. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya. Nasabah yang digolongkan ke dalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja, investasi, konsumtif, produktif dan lain-lain.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi akan tetapi juga nasabah.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapat jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

2.3.5. Kebijakan Perkreditan

Setiap bank harus membuat suatu kebijakan perkreditan secara tertulis sebagai pedoman dalam hal pemberian kredit agar pemberian kredit dapat dilaksanakan secara konsisten berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat. Pada

SK Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 (dalam Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono, 2011:243) ditetapkan bahwa pedoman dalam pemberian kredit sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagai berikut:

1. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan
2. Organisasi dan manajemen perkreditan
3. Kebijaksanaan persetujuan pemberian kredit
4. Dokumentasi dan administrasi kredit
5. Pengawasan kredit
6. Penyelesaian kredit bermasalah

Menurut Teguh (2010:20), dalam menetapkan kebijakan perkreditan tersebut harus diperhatikan 3 (tiga) asas pokok yaitu:

1. Asas likuiditas

Asas likuiditas adalah suatu asas yang mengharuskan bank untuk tetap dapat menjaga tingkat likuiditasnya, karena suatu bank yang tidak likuid akibatnya akan sangat parah yaitu hilangnya kepercayaan dari para nasabahnya atau dari masyarakat luas. Suatu bank dikatakan likuid apabila memenuhi criteria antara lain:

- a. Bank tersebut memiliki *cash asset* sebesar kebutuhan yang akan digunakan untuk memenuhi likuiditasnya.
- b. Bank tersebut memiliki *assets* lainnya yang dapat dicairkan sewaktu-waktu tanpa mengalami penurunan nilai pasarnya.
- c. Bank tersebut mempunyai kemampuan untuk menciptakan *cash asset* baru melalui berbagai bentuk utang.

2. Asas solvabilitas

Asas solvabilitas, usaha pokok perbankan yaitu menerima simpanan dana dari masyarakat dan disalurkan dalam bentuk kredit.

3. Asas rentabilitas

Asas rentabilitas, sebagaimana halnya pada setiap kegiatan usaha akan selalu mengharapkan untuk memperoleh laba, baik untuk mempertahankan eksistensinya, maupun untuk keperluan mengembangkan dirinya.

2.3.6. Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh perbankan pada umumnya tidak jauh berbeda. Perbedaannya terletak pada persyaratan yang ditetapkan dan pertimbangan masing-masing.

Prosedur pemberian kredit adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan berkas-berkas

Pengajuan proposal kredit hendaklah berisi antara lain: (a) latar belakang; (b) maksud dan tujuan; (c) besarnya kredit dan jangka waktu; (d) cara pengembalian kredit; dan (e) jaminan kredit.

2. Pemeriksaan berkas-berkas

Untuk mengetahui apakah berkas pinjaman yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika belum lengkap atau cukup, maka nasabah diminta untuk melengkapinya dan apabila sampai batas waktu tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangannya, maka permohonan kreditnya dapat dibatalkan.

3. Wawancara I

Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam.

4. *On the spot*

Merupakan kegiatan pemeriksaan kelapangan dengan meninjau berbagai obyek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasilnya dicocokkan dengan hasil wawancara I.

5. Wawancara II

Merupakan bagian perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan.

6. Penilaian dan analisis kebutuhan modal

Merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menilai kebutuhan kredit yang sebenarnya.

7. Keputusan kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya.

8. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit.

9. Realisasi kredit

Diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

10. Penyaluran/penarikan

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit.

11. Penilaian kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali.

2.4. Hasil Penelitian yang Relevan

Dalam penelitian ini penulis memaparkan tiga penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang efektifitas penerapan sistem pengendalian internal pemberian kredit.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Sasmitaningtyas (2005), melakukan penelitian dengan judul "Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Studi Kasus BPR BKK Kraden Menden Blora". Hasil evaluasi menunjukkan bahwa struktur organisasi pada BPR BKK Kradenan Menden telah memisahkan fungsi dan tugas secara tepat, sistem wewenang dan prosedur pencatatan dalam pemberian kredit sudah baik, praktek-praktek yang sehat dalam pemberian kredit telah dilaksanakan dengan baik dan adanya suatu tingkat kecakapan pegawai yang sesuai dengan tanggung jawab dalam usaha untuk menghindari terpusatnya kegiatan pada satu orang.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Luh Artining Miradewi dkk (2014), melakukan penelitian dengan judul "Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Seririt". Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendaliannya baik dan

dikategorikan memadai. Pengujian kepatuhan dengan menggunakan *attribute sampling*, metode *stop-or-go sampling* menunjukkan sistem pengendalian intern pemberian kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Seririt dikatakan efektif.

Penelitian yang dilakukan oleh Pirdaus (2001), melakukan penelitian dengan judul "Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bina Usaha Desa Kepenuhan Barat". Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses persetujuan kredit didominasi Direktur dalam menentukan calon nasabah yang berhak memperoleh pinjaman, penentuan jumlah *plafond* kredit yang disetujui oleh pihak BUMDes Bina Usaha disesuaikan dengan jaminan calon nasabah, dan proses pencairan pinjaman menggunakan bukti transaksi berupa kuitansi disertai dengan Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K).

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ulfa (2010), melakukan penelitian dengan judul "Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pengeluaran Kas pada PT. Global Engineering Technology Jakarta". Hasil penelitian dengan analisis kualitatif dari jawaban kuesioner menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pengeluaran kas pada perusahaan sudah efektif. Sedangkan analisis kuantitatif dengan melakukan pengujian pengendalian menggunakan metode *Fixed-Sample-Size-Attribute Sampling* didapat hasil pemeriksaan bahwa AUPL sebesar 4% dengan DUPL sebesar 5%, yang berarti $AUPL < DUPL$ sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern perusahaan dikatakan efektif.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Sasmitaningtyas, ulfa, Pirdaus dan Luh Artining Miradewi dkk dengan penelitian yang sekarang adalah sama-sama meneliti tentang evaluasi efektifitas terhadap penerapan sistem pengendalian intern. Perbedaan penelitian sekarang dengan terdahulu adalah terletak pada teknik analisa yang digunakan dan lokasi perusahaan.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis melakukan penelitian dengan mengambil objek penelitian pada PD. BPR Rokan Hulu yang beralamat di Jln. Tuanku Tambusai, Kompleks Pasar Modern Kampung Padang-Pasir Pengaraian.

3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu bersifat deskriptif, karena tidak berhubungan dengan jumlah atau angka, melainkan mengenai tinjauan efektifitas penerapan sistem pengendalian internal pemberian kredit pada PD. BPR Rokan Hulu.

3.3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan di PD. BPR Rokan Hulu sebanyak 36 orang. Sedangkan Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai pada bagian kredit di PD. BPR Rokan Hulu yang berjumlah 12 orang.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang terdiri dari data non angka yang bersifat deskriptif, berupa gambaran umum perusahaan, struktur organisasi perusahaan, visi dan misi, serta data-data lain yang dibutuhkan oleh penulis dalam penelitian ini.

Sumber data yang digunakan di peroleh dari data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari para responden yang terpilih berupa respon tertulis dan lisan sebagai tanggapan atas wawancara yang diajukan oleh peneliti kepada pihak

terkait. Serta data sekunder yaitu data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk data dan dokumen yang ada pada PD. BPR Rokan Hulu tahun 2015.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghimpun data yang diperlukan, maka dipergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a) Wawancara

Wawancara yaitu melakukan wawancara langsung kepada karyawan yang terpilih menjadi responden untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.

b) Kuesioner

Kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden mengenai masalah yang akan diteliti.

c) Dokumentasi

Selain wawancara dan kuesioner, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, jurnal kegiatan dan sebagainya. Dokumen yang penulis kumpulkan berkaitan dengan penerapan sistem pengendalian internal pemberian kredit PD. BPR Rokan Hulu.

3.6. Defenisi Operasional

Untuk mengidentifikasi teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini maka konsep operasional dalam penelitian ini adalah:

a. Sistem pengendalian internal

Yaitu pengendalian intern yang meliputi struktur organisasi, metode-metode, dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi,

mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2009:180).

b. Pemberian kredit

Merupakan kegiatan usaha yang mendominasi pengalokasian dana bank. Oleh karena itu sumber utama pendapatan bank berasal dari kegiatan penyaluran kredit dalam bentuk pendapatan bunga (Dahlan, 2011:165).

3.7. Instrumen Penelitian

Alat yang digunakan untuk mengukur data yang dihasilkan oleh para responden adalah dengan menggunakan kuesioner yaitu teknik pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan daftar pertanyaan mengenai masalah yang diteliti Hasil jawaban kuesioner dihitung menggunakan rumus berikut:

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah Jawaban "Ya"}}{\text{Jumlah Jawaban Kuesioner}} \times 100 \%$$

Penulis menyediakan jawaban secara kuesioner tertutup, yaitu responden hanya memberi dua alternatif jawaban yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun skala pengukuran yang digunakan untuk kuesioner adalah skala dikotomis yaitu jenis skala pengukuran yang hanya terdiri dari dua pilihan. Adapun pilhan jawabannya yaitu "Ya" atau "tidak" sebagai ukuran tingkat kesesuaian dengan kriteria-kriteria tertentu sehingga responden cukup memilih

salah satu jawaban yang dianggap paling cocok menurut responden dari ketiga alternatif jawaban tersebut.

Untuk kepentingan hasil perhitungan persentase, penulis akan menggunakan ketentuan yang dikemukakan berdasarkan rumusan Champion menurut Dean J. Champion (2001:301) yang dikutip dalam bukunya *Basic Statistic For Social Research* menyebutkan klasifikasi tersebut di atas maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. 0% - 25% = Penerapan pengendalian internal tidak efektif dalam menunjang prosedur pemberian kredit.
2. 26% - 50% = Penerapan pengendalian internal kurang efektif dalam menunjang prosedur pemberian kredit.
3. 51% - 75% = Penerapan pengendalian internal cukup efektif dalam menunjang prosedur pemberian kredit.
4. 76% - 100% = Penerapan pengendalian internal sangat efektif dalam menunjang prosedur pemberian kredit.

3.8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu suatu teknik menganalisis data yang berguna untuk menggambarkan secara utuh kenyataan mengenai masalah yang diteliti. Data dan informasi yang diperoleh dilapangan kemudian dihubungkan dengan landasan teori-teori yang relevan untuk mendapatkan kesimpulan. Adapun tahapannya yaitu:

1. Analisis prosedur kredit pada PD. BPR Rokan Hulu
2. Analisis realita prosedur kredit pada PD. BPR Rokan Hulu
3. Evaluasi sistem pengendalian interen